

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kabupaten Lamongan Tahun 2021 dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) merupakan kewajiban bagi instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana yang diamanatkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999, yang mewajibkan instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan berdasarkan Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja kegiatan dan sasaran yang mengacu pada RENSTRA BPBD Kabupaten Lamongan Tahun 2016 - 2021.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun Anggaran 2019 ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Lamongan, yang sekaligus merupakan rangkaian pelaksanaan evaluasi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam mengemban visi, misi dan tujuan organisasi. LKJIP ini sekaligus merupakan parameter yang dapat digunakan untuk mengetahui sejauh mana perencanaan strategik yang ditetapkan tersebut dapat mewujudkan sasaran dan tujuan yang diharapkan tercapai.

Penyusunan LKJIP BPBD ini telah dupayakan sebaik mungkin, walaupun demikian LKJIP BPBD Kabupaten Lamongan tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan sehubungan dengan kendala-kendala yang dihadapi. Namun demikian BPBD Kabupaten Lamongan telah mengupayakan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut melalui koordinasi dengan pelaksana kegiatan. Semoga LKJIP BPBD Kabupaten Lamongan ini telah dapat mencerminkan kinerja BPBD Kabupaten Lamongan tahun 2021.

Akhirnya dengan memohon petunjuk dan bimbingan dari Allah SWT semoga BPBD Kabupaten Lamongan mampu melaksanakan tugas pengabdian dengan sebaik - baiknya serta mampu meningkatkan prestasi kerja.

Lamongan, Desember 2021

**KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN LAMONGAN**

Dr. MUGITO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19671024 198809 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas, Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	2
C. Data Umum Organisasi.....	5
1. Personil.....	5
2. Sarana dan Prasarana	8
3. Pembiayaan	11
D. Sistematika Penyajian LkjiP.....	14
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA	15
A. Rencana Strategis	15
1. Tujuan.....	16
2. Sasaran dan Indikator Kinerja.....	16
B. Rencana Kerja Tahunan Tahun 2021.....	18
1. Program dan Kegiatan.....	18
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021.....	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	29
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	29
1. Pencapaian Kinerja.....	29
2. Perbandingan Realisasi Kinerja.....	32
3. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RPJMD/RENSTRA..	34

4.	Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional.....	34
5.	Analisis Penyebab Keberhasilan yang Telah Dilakukan.....	35
6.	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	35
7.	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Maupun Pencapaian Kinerja.....	38
B	Realisasi Anggaran	38
BAB IV	PENUTUP	42
A.	Kesimpulan	42
B.	Saran	43
LAMPIRAN – LAMPIRAN		44

IKHTISAR EKSEKUTIF

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah merupakan kemampuan mempertanggungjawabkan dari suatu instansi pemerintah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara periodik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Lamongan menyajikan laporan capaian kinerja (*performance result*) selama Tahun 2021 dan mengacu pada Renstra BPBD Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 serta Rencana Kerja Tahun 2021.

Untuk Mewujudkan Visi Kepala Daerah Kabupaten Lamongan yaitu **“Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”** dan misi yang diemban oleh Badan Penanggulangan Bencana adalah Misi, yaitu **Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga kelestarian lingkungan.**

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcome* atau minimal *output* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Berdasarkan Evaluasi Kinerja dan Analisis pencapaian kinerja atas kegiatan yang dilaksanakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi BPBD Kabupaten Lamongan, untuk Tahun 2021 ini dapat dikatakan kinerja BPBD Kabupaten Lamongan telah dilaksanakan dengan hasil capaian yang sangat baik / sangat berhasil.

Namun demikian, keberhasilan yang dicapai BPBD Kabupaten Lamongan tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dijumpai, baik bersifat internal maupun eksternal. Kondisi ini diantisipasi dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas kendala / hambatan yang dijumpai, sehingga diketahui penyebab timbulnya hambatan-hambatan dalam pencapaian kinerja. Menyadari hal tersebut, BPBD Kabupaten Lamongan telah mempersiapkan strategi dan cara pemecahannya, sehingga pada tahun-tahun mendatang hambatan-hambatan tersebut dapat diminimalisir.

Adapun kendala-kendala yang mungkin dihadapi dalam tercapainya tujuan dan sasaran BPBD Kabupaten Lamongan adalah masih Kurangnya staf pada BPBD Kab. Lamongan yang menangani pengelola kegiatan yang mendukung dalam kinerja BPBD Kabupaten Lamongan, untuk itu perlu ditingkatkannya pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan serta sarana dan prasarana demi tercapainya tujuan dan sasaran BPBD Kabupaten Lamongan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan Daerah merupakan salah satu sub sistem dari pembangunan nasional yang meliputi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang ditujukan untuk meningkatkan harkat, martabat dan memperkuat jati diri serta kepribadian masyarakat dalam pendekatan lokal, nasional dan global. Dalam perspektif perencanaan pembangunan, Pemerintah Daerah harus memperhatikan keseimbangan berbagai aspek dalam satu kesatuan wilayah pembangunan ekonomi, hukum, sosial, budaya, politik, pemerintahan dan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, dengan diikuti oleh penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel (*Good Governance*). Kepemerintahan yang akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan visi misi pembangunan daerah dan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkaitan dengan hal itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna.

Salah satu azas penyelenggaraan good governance yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP).

Pertanggungjawaban dimaksud disampaikan kepada atasan masing-masing, kepada lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas yang berkewenangan, dan akhirnya kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan serta dilakukan melalui sistem akuntabilitas dan media pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan secara periodik dan melembaga.

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKJIP) adalah suatu laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/ sasaran strategis instansi. Laporan yang dibuat secara sistematis ini berisi tentang pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan adanya perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan. LKJIP tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

B. TUGAS, POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lamongan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah, BPBD Kabupaten Lamongan adalah Organisasi Perangkat daerah (OPD) yang merupakan unsur pendukung Kepala Daerah dan dipimpin oleh Kepala Badan, yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.

BPBD Kabupaten Lamongan terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Lamongan dan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 27 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan.

1. Tugas BPBD

BPBD mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang penanggulangan bencana yang meliputi pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik serta rehabilitasi dan rekonstruksi;
- b. Penetapan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi yang adil dan setara, sesuai dengan kebijakan Pemerintah, BPBD Provinsi Jawa Timur dan BNPB.

2. Fungsi BPBD

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan Operasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi;
- b. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Bencana termasuk Bencana Kebakaran;
- c. Penyusunan pedoman Operasional terhadap Penanggulangan Bencana;
- d. Penyampaian Informasi kegiatan Penanggulangan Bencana pada Masyarakat.
- e. Penggunaan dan Pertanggung jawaban sumbangan / bantuan.
- f. Pelaporan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 1 tahun 2010 tanggal 14 Januari 2010, maka bersama ini disajikan Bagan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan sebagai berikut :

Susunan Organisasi BPBD terdiri dari :

1. Kepala Badan

Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan secara ex-Officio sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lamongan, sedangkan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya BPBD Kabupaten Lamongan dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana.

2. Unsur Pengarah

Unsur Pengarah terdiri dari :

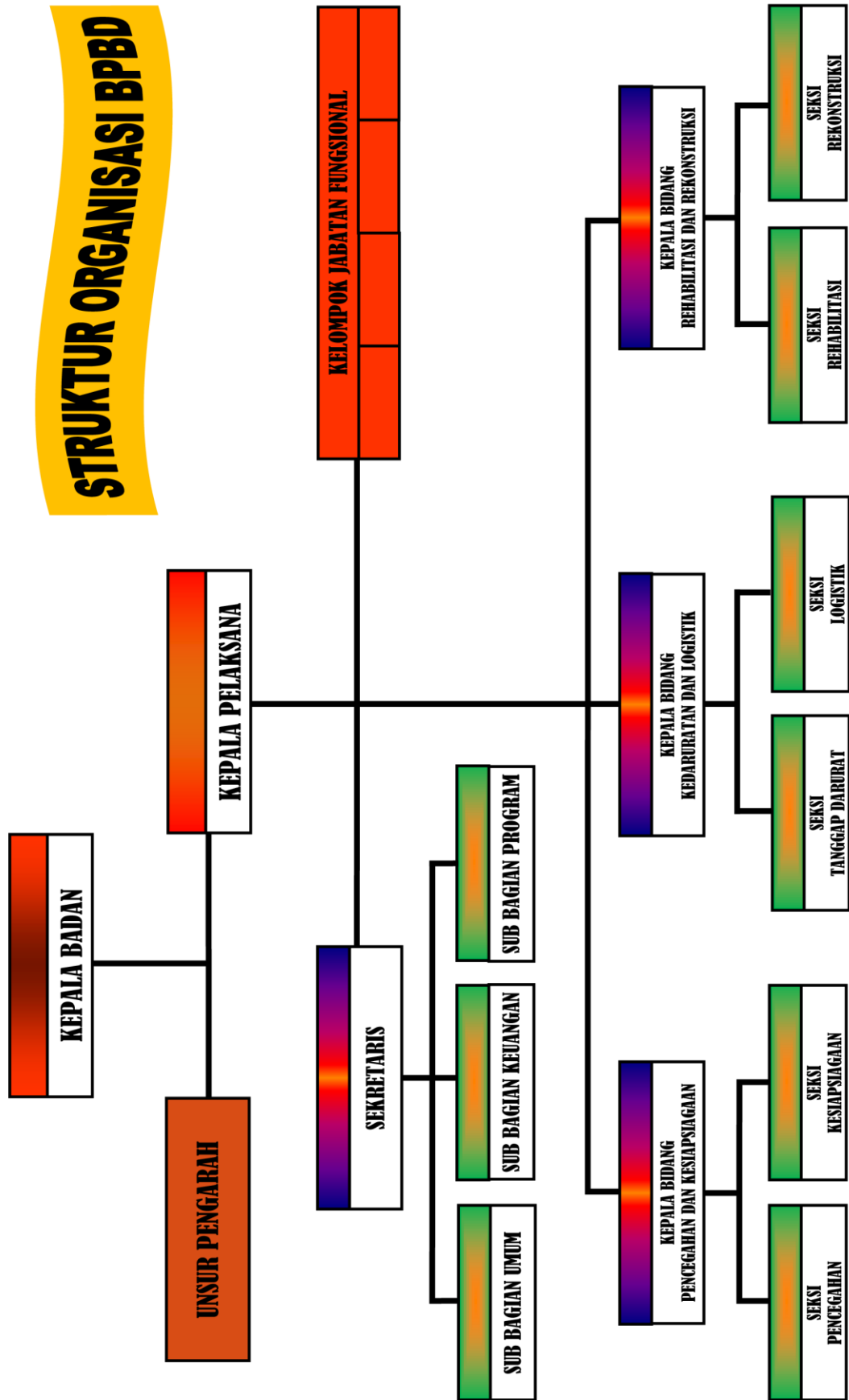
- a. Pejabat Pemerintah Daerah
- b. Anggota masyarakat profesional dan ahli

Unsur Pengarah ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

3. Unsur Pelaksana

- a. Unsur Pelaksana BPBD dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.
- b. Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD terdiri dari :
 - Kepala Pelaksana
 - Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum
 - 2) Sub Bagian Keuangan
 - 3) Sub Bagian Program
 - Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahi:
 - 1) Seksi Pencegahan
 - 2) Seksi Kesiapsiagaan
 - Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahi:
 - 1) Seksi Tanggap Darurat
 - 2) Seksi Logistik
 - Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahi:
 - 1) Seksi Rehabilitasi
 - 2) Seksi Rekonstruksi
 - Kelompok Jabatan Fungsional

STRUKTUR ORGANISASI BPBD



C. DATA UMUM ORGANISASI

1. Personil

BPBD dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan . Susunan Organisasi/Personil BPBD terdiri dari :

- a) Kepala Pelaksana
- b) Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum
 - 2) Sub Bagian Keuangan
 - 3) Sub Bagian Program
- c) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahi :
 - 1) Seksi Pencegahan
 - 2) Seksi Kesiapsiagaan
- d) Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahi :
 - (1) Seksi Tanggap Darurat
 - (2) Seksi Logistik
- e) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi :
 - (1) Seksi Rehabilitasi
 - (2) Seksi Rekonstruksi

adapun data personil BPBD Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Ket.
1.	Dr. MUGITO, MM	Kepala Pelaksana	
2.	ZAINI, SH., M.Si	Sekretaris	

3.	GUNAWAN, SE	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	
4.	MUHAMAD ANWAR S.Si, M.Si	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	
5.	M. MUSLIMIN, SH,MM	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik	
6.	NASIKIN	Plt.Kepala Seksi Tanggap Darurat	
7.	AINIS YUNITA DEWI, SE	Plt.Kepala Seksi Pencegahan	
8.	SUEB, SH	Kepala Seksi Kesiapsiagaan	
9.	ISKANDAR, SE	Kepala Seksi Logistik	
10.	IBRAHIM, SSTP	Kepala Seksi Rehabilitasi	
11.	DJOKO SETIJO WIDODO, S.Gz	Kepala Seksi Rekonstruksi	
12.	KHOIRUDIN YUNUS, S.E.	Kepala Sub Bagian Program	
13.	PEPEN TEGUH ARDIANTO, S.sos.	Kepala Sub Bagian Umum	
14.	R. PRIMADINI LESTARI, S.Psi, MM	Kepala Sub Bagian Keuangan	
15.	SRI SUKARTI, SE	Staf	
16.	SYAHRIEL BURHANUDIN, SIP	Staf	
17.	SLAMET PRAMONO	Staf	
18.	SLAMET PRAMONO	Staf	
19.	SUKAERI	Staf	
20.	MUSTARI	Staf	
21.	AGUS SUTOMO	Tenaga Administrasi	
22.	LILIK MURTOMO	Tenaga Administrasi	

23.	MOCH FARID NURCAHYO	Tenaga Administrasi	
24.	ANGGA ADI KURNIAWAN	Tenaga Administrasi	
25.	INDRA SUSANTO	Tenaga Administrasi	
26.	DITA SETIAWAN, SP	Tenaga Administrasi	
27.	RINA APRILIA, SPD	Tenaga Administrasi	
28.	SAIFUDDIN JEFRI	Tenaga Administrasi	
29.	WAHYU BAGUS P.	Tenaga Administrasi	
30.	WULAN SARI, S.Pi	Tenaga Administrasi	
31.	HAMIDAH	Tenaga Administrasi	
32.	NUR KHASANA, SE	Tenaga Administrasi	
33.	MUHAMMAD ABDUL GHOFUR	Tenaga Administrasi	
34.	RESTU INDRA NURANI, SH	Tenaga Administrasi	
35.	ASTRID VALERINA L.S	Tenaga Administrasi	
36.	ARDA DIFA ABIEUKA	Tenaga Administrasi	
37.	BAYU PAMUNGKAS	Tenaga Administrasi	
38.	ANDI WALUYO	Tenaga Administrasi	
39.	GILANG FRISMA N.P	Tenaga Administrasi	
40.	MOCH HENDRO BUDI S.	Tenaga Pengemudi	
41.	MUHAMMAD LUKMAN	Tenaga Kebersihan	
42.	EDI SHOBIRIN	Agen Bencana	
43.	AHMAD FARID RIZKY	Agen Bencana	

2. Sarana dan Prasarana

Guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas aparatur dan semakin meningkatnya penyelenggaraan Urusan Pemerintahan khususnya dalam penanggulangan bencana serta dalam kerangka pencapaian tujuan sesuai Visi dan Misi BPBD Kabupaten Lamongan, maka diperlukan adanya sarana dan prasarana yang dimiliki, adapun sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BPBD Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :

Daftar Kendaraan Dinas dan Operasional

No.	Uraian	Jumlah
I.	Kendaraan Dinas	
	1. Kendaraan Dinas Roda 4	
	- Kendaraan Dinas Eselon II	1 Unit
	- Kendaraan Dinas Eselon III	3 Unit
	2. Kendaraan Dinas Roda 2	
	- Kendaraan Dinas Eselon IV	6 Unit
II.	Kendaraan Operasional	
	1. Kendaraan Operasional Roda 6	
	- Truk Tangki Air	5 Unit
	- Truk Logistik 1 Unit	1 Unit
	2. Kendaraan Operasional Roda 4	
	- Mobil Rescue	1 Unit
	- Mobil pick Up	2 Unit
	3. Kendaraan Operasional Roda 3	
	- Tossa	2 Unit

	4. Kendaraan Operasional Roda 2	
	- Motor Trail	12 Unit

Daftar Peralatan dan Perlengkapan Kantor

No.	Uraian	Jumlah
1.	Almari	22 Unit
2.	Almari Arsip/ Rak Arsip	3 Unit
3.	Filling Cabinet	15 Unit
4.	Kursi Lipat	123 Unit
5.	AC	24 Unit
6.	Televisi	1 Unit
7.	Tangga Lipat	1 Unit
8.	PC	19 Unit
9.	Notebook	14 Unit
10.	Printer	25 Unit
11.	Meja Kerja Eselon II	2 Unit
12.	Meja Kerja Eselon III	8 Unit
13.	Meja Kerja Eselon IV	12 Unit
14.	Meja Non Struktural	25 Unit
15.	Meja Kerja Staf	19 Unit
16.	Kursi Kerja Eselon II	2 Unit
17.	Kursi Kerja Eselon III	4 Unit
18.	Kursi Kerja Eselon IV	11 Unit
19.	Kursi Staf	30 unit
20.	Kamera	8 Unit

21.	Handycam	5 Unit
22.	LCD Proyektor	1Unit
23	HT	10 Unit
24	Wireless (Wireles Adapter)	10 Unit
25	Stabilisator (UPS / Stabilizer)	1 Unit
26	Camera Video (Kamera Drone)	1 Unit
27	Router (Router / Switch Waireles)	3 Unit
28	Unit Transceiver VHF Portable (Radio RIG)	1 Unit
29	Unit Transceiver UHF Stationary (Radio Repeater)	1 Unit
30	CCTV 6 Channel (CCTV 6 Titik)	1 Unit
31	Mast Tower (Tower Radio RIG)	1 Unit
32	Perahu Penumbang (Perahu Rakit)	3 Unit
33	Mesin Bor (Bor Listrik)	1 Unit
34	Mesin Kompresor (kompresor Angin)	1 Unit
35	Mesin Kompresor (Kompresor Air)	1 Unit
36	Mesin Las Listrik (Peralatan las listrik)	1 Unit
37	Lain-lain (EWS BANJIR TELEMETRI (SMS GATE WAY))	1 Unit
38	Mesin Absensi (Mesin Absensi)	1 Unit
39	Lain-lain (Jaket Pelampung)	20 Unit
40	Modem (Modem)	2 Unit
41	Sound System (Sound System)	1 Unit
42	Facsimile	1 Unit

3. Pembiayaan

Guna mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Tahun 2021, dalam pelaksanaan tugas BPBD Kabupaten Lamongan memperoleh anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Lamongan yang secara rinci disajikan pada tabel sebagai berikut :

Perangkat Daerah / Program / kegiatan	Anggaran
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.937.417.248
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.632.365.548
PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENAGGULANGAN KORBAN BENCANA	145.000.000
PROGRAM PENANGANAN TANGGAP DARURAT	109.999.850
PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA	50.051.850

Dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut :

Perangkat Daerah Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.937.417.248
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	32.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	22.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.000.000
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.552.295.548
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.800.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	15.000.000

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.000.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.000.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.096.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	102.500.000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	496.064.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	31.266.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	58.086.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.758.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	126.500.00
PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENAGGULANGAN KORBAN BENCANA	
Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	95.000.000
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	10.000.000

Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	20.000.000
Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	20.000.000
PROGRAM PENANGANAN TANGGAP DARURAT	
Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	15.000.000
Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	10.000.000
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	70.000.000
Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	14.999.850
PROGRAM REHABILITASI DAN REKONTRUKSI PASCA BENCANA	
Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	40.013.350
Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	10.038.500

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKJIP

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja BPBD Kabupaten Lamongan pada Tahun 2021. Capaian kinerja (performance results) Tahun 2021 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) Tahun 2021 sebagai tolak ukur keberhasilan Tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) BPBD Kabupaten Lamongan Tahun 2020 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

Bab I – Pendahuluan

menjelaskan secara ringkas latar belakang, aspek strategis BPBD Kabupaten Lamongan, serta struktur organisasi;

Bab II – Perencanaan dan Perjanjian Kerja,

menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran BPBD Kabupaten Lamongan Tahun 2021

Bab III – Akuntabilitas Kinerja Tahun 2021, menjelaskan analisis pencapaian kinerja BPBD Kabupaten Lamongan dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2021.

Bab IV – Penutup, menjelaskan simpulan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja BPBD Kabupaten Lamongan Tahun 2021 dan menguraikan saran yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

Lampiran – melampirkan tabel RKT, Evaluasi Renja, Rencana Aksi, monitoring rencana aksi

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

1. Tujuan

Visi yang termuat dalam RPJMD merupakan visi Bupati/Wakil Bupati terpilih pada pemilukada yang dilaksanakan tanggal 9 Desember 2015. Sebagaimana disampaikan pada pemaparan visi dan misi calon Bupati/Wakil Bupati di siding DPRD dan sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang termuat dalam tahapan ketiga Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025 dan RTRW Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2031. Visi tersebut juga disinergikan dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 serta RPJM Nasional Tahun 2015-2019 (NAWACITA). Dari hasil integrasi dan harmonisasi beberapa kebijakan tersebut ditetapkan visi Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 adalah:

“Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”

Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalannya sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Kabupaten dan seluruh stakeholder's dalam merealisasikan dan semakin memantapkan pembangunan Kabupaten Lamongan secara komprehensif. Secara filosofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu :

Misi 3.

1. Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga kelestarian lingkungan dengan penjelasan sebagai berikut: Misi ini dimaksudkan untuk memantapkan penyediaan infrastruktur dasar berupa jalan, jembatan, perhubungan, permukiman, air bersih serta sarana penunjang produksi barang dan jasa yang keseluruhannya dapat menunjang akses perekonomian. Pemantapan infrastruktur dasar dilaksanakan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan melalui peningkatan kualitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

1. Sasaran dan indikator kinerja

Untuk merealisasikan misi, tujuan serta sasaran yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Lamongan perlu ditetapkan tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Lamongan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan. Sedangkan sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan. Tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Kabupaten Lamongan tahun 2016-2021 adalah:

**KESELARASAN VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
BPBD KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2016-2021**

MISI 3			
Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga kelestarian lingkungan			
TUJUAN			
Tersedianya infrastruktur yang mampu mendukung peningkatan aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat Kabupaten Lamongan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan			
SASARAN 6			
Terwujudnya pengendalian bencana alam			
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Penanggung Jawab
Terwujudnya pengendalian bencana alam	1. Terwujudnya masyarakat yang tangguh bencana	Prosentase pemahaman dan kemampuan tentang kebencanaan di Daerah rawan bencana	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
	2. Terwujudnya penanganan darurat bencana yang cepat dan tepat	Prosentase Penanganan bencana saat tanggap darurat	Bidang Kedaruratan dan Logistik
	3. Terwujudnya pemulihan masyarakat dan sarpras yang lebih baik	Prosentase penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2021

Dengan memperhatikan rancangan awal dan berpedoman pada Renstra, BPBD Kabupaten Lamongan menyusun Rencana Kerja (Renja) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang meliputi kegiatan pokok serta kegiatan pendukung untuk mencapai sasaran hasil program induknya, dan dirinci menurut indikator keluaran, sasaran keluaran pada tahun rencana, prakiraan sasaran tahun berikutnya, lokasi, pagu indikatif sebagai indikasi pagu anggaran, serta cara pelaksanaannya. Dari Renja yang telah disusun kemudian BPBD Kabupaten Lamongan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). RKA yang memuat informasi kinerja yang meliputi program, kegiatan dan sasaran kinerja, serta rincian anggaran.

Keterkaitan antara Renja dan RKA adalah RKA memuat informasi yang tertuang dalam Renja, termasuk informasi alokasi pendanaan yang telah dimutakhirkan sesuai dengan kemampuan fiskal pemerintah (resources envelope). Informasi pendanaan dalam RKA memuat informasi Rincian Anggaran, antara lain: output, komponen input, jenis belanja, dan kelompok belanja.

Rencana Kinerja Tahunan BPBD Kabupaten Lamongan, dapat dilihat pada formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT) terlampir.

1. Program dan kegiatan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2021 dengan dana yang bersumber dari APBD Daerah Kabupaten Lamongan dengan rincian sebagai berikut:

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	PROGRAM	KEGIATAN
Terwujudnya pengendalian bencana alam	Terwujudnya Peningkatan Pelayanan di Bidang Kebencanaan	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan

				Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2. Sub Kegiatan Penyediaan

				Peralatan Rumah Tangga 3. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 6. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengka 3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4. Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	Terwujudnya Masyarakat Tangguh Bencana	Rasio Peningkatan Kemampuan Komunitas Masy. Tentang	PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENAGGULANG	1. Kegiatan Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota

		kebencanaan di Daerah Rawan Bencana	AN KORBAN BENCANA	2. Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per jenis Bencana) 3. Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota 4. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
	Terwujudnya Penanganan darurat bencana yang cepat dan tepat	Prosentase penanganan bencana yang ditangani dengan cepat dan tepat	PROGRAM PENANGANAN TANGGAP DARURAT	1. Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota 2. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 3. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 4. Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana

	Terwujudnya pemulihan masyarakat dan sarpras yang lebih baik	Prosentase kerusakan akibat bencana yang telah direhabilitasi sesuai dengan SOP	PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA	1. Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota 2. Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota
--	--	---	---	---

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai dan disepakati antara pihak yang menerima amanah/pengemban tugas dan penanggungjawab kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tugas dan tanggungjawab kinerja.

Dalam Perjanjian Kinerja BPBD Kabupaten Lamongan ini memuat dua unsur pokok, yaitu pernyataan perjanjian kinerja yang harus ditandatangani oleh penanggungjawab program dengan atasan langsung dan lampiran yang berisi tentang target capaian yang ditetapkan bersama yang akan dicapai pada akhir periode penganggaran. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan penyusunan perjanjian kinerja adalah :

- a) Konsistensi, keselarasan dan proporsionalitas dalam menjabarkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja (Renja) ke dalam penetapan prioritas program /kegiatan dan alokasi anggaran.
- b) Ketepatan dalam merumuskan sasaran-sasaran strategis dan indikator kinerja.
- c) Ketepatan dalam mengestimasi target kinerja dari setiap indikator kinerja.
- d) Obyektivitas dalam pengukuran kinerja

Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan (RPJMDP) Tahun 2016-2021, sehingga secara substansial Perjanjian Kinerja Tahun 2021 tidak jauh berbeda dengan Rencana Kinerja Tahun 2020. Berikut Tabel Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021

Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Sasaran	Indikator	Target
1	Terwujudnya masyarakat yang Tangguh Bencana	Prosentase Peningkatan Kemampuan Komunitas Masyarakat Tentang Kebencanaan di Daerah Rawan Bencana	91,44%
2	Terwujudnya Penanganan Darurat Bencana yang Cepat dan Tepat	Prosentase penanganan Bencana yang Cepat Ditangani Dengan Cepat dan Tepat	100%
3	Terwujudnya Pemulihan Masyarakat dan Sarpras yang lebih baik	Prosentase Kerusakan Akibat Bencana Yang Telah Direhabilitasi sesuai dengan SOP	100%

Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Sasaran	Indikator	Target
1	Terlayannya Unit Kerja internal dengan baik	Presentase unit kerja internal yang terlayani dengan baik	100%
2	Meningkatnya Sarana prasarana aparatur dengan kondisi baik	Persentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi baik	100%
3	Meningkatnya disiplin aparatur	Persentase aparatur yang disiplin	100%
4	Terpenuhinya tingkat penyelesaian tugas setelah mengikuti peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase tingkatan penyelesaian tugas setelah mengikuti peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%
5	Tercapainya ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen perencanaan, laporan kinerja dan keuangan	Persentase jumlah dokumen perencanaan, laporan kinerja dan laporan keuangan yang tepat waktu	100%

Sub Bagian Program

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya kelembagaan pemerintah yang tangguh dalam pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana.	1. Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 2. Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi 3. Tersedianya jumlah Dokumen LKPJ, LPPD dan LKJIP	4 Laporan 4 Dokumen 3 Dokumen

Sub Bagian Umum

No	Sasaran	Indikator	Target
1.	Terwujudnya kelembagaan pemerintah yang tangguh dalam pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana.	1. Unit kerja internal yang terlayani dengan baik 2. Sarana dan prasarana apatur dengan kondisi baik	100% 100%

Sub Bagian Keuangan

No	Sasaran	Indikator	Target
1.	Terwujudnya Rencana Kerja OPD	Tersedianya Rencana Kerja OPD	100 %
2.	Terwujudnya pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai	Tersedianya pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai	100 %
3.	Terwujudnya administrasi dan pembukuan keuangan	Tersedianya administrasi dan pembukuan keuangan	100%
4.	Terwujudnya laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan	Tersedianya laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan	100%

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan**Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan**

No	Sasaran	Indikator	Target
1	Terwujudnya Masyarakat yang tangguh bencana	Rasio Peningkatan Kemampuan Komunitas Masy. Tentang kebencanaan di daerah Rawan Bencana	100%

Seksi Pencegahan

No	Sasaran	Indikator	Target
1.	Penyediaan Informasi tentang potensi bencana yang ada di Kab. Lamongan	Tersusunya Dokumen Kajian Risiko Bencana	1 Dokumen
		Presentase Sosialisasi Perangkat Desa	100%

Seksi Kesiapsiagaan

No	Sasaran	Indikator	Target
1.	Meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman bencana	Terlaksananya Jaga Posko	60 Hari

Bidang Kedaruratan dan Logistik**Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik**

No	Sasaran	Indikator	Target
1	Terwujudnya Penanganan Darurat Bencana yang cepat dan tepat.	Prosentase penanganan bencana yang ditangani dengan cepat dan tepat	100%

Seksi Tanggap Darurat

No	Sasaran	Indikator	Target
1	Terlaksananya Penanganan darurat bencana yang cepat dan tepat	Jumlah Peserta Pelatihan	4 orang
		Jumlah Koordinasi dan Tersedianya BBM	1 Tahun
		Presentase Koordinasi dan penanganan bencana	100%
		Aktivasi Posko darurat bencana	45 hari

Seksi Logistik

No	Sasaran	Indikator	Target
1	Terlaksananya Penanganan darurat bencana yang cepat dan tepat	Presentase Bantuan Masyarakat yang terdampak bencana	100%

Bidang Rekontruksi dan Rehabilitasi**Kepala Bidang Rekontruksi dan Rehabilitasi**

No	Sasaran	Indikator	Target
1	Terwujudnya Pemulihan masyarakat dan sarpras yang lebih baik	Prosentase kerusakan akibat bencana yang telah direhabilitasi sesuai dengan SOP	100%

Seksi Rehabilitasi

No	Sasaran	Indikator	Target
1	Meningkatnya pelaksanaan penilaian kerusakan dan kerugian Pasca Bencana	Jumlah Regulasi pengkajian kebutuhan pasca bencana	1 Aturan/Dokumen

Seksi Rekontruksi

No	Sasaran	Indikator	Target
1.	Meningkatnya pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pasca bencana	Jumlah Bantuan Bahan Bangunan Pasca Bencana, Jumlah Laporan Monev, Jumlah Pelaksanaan Monev Pasca Bencana	1 Paket, 1 Laporan, 10 Kali

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan wujud nyata Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan kepada pemberi mandat atas pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam suatu media pelaporan. Penyusunan LKJIP BPBD Kabupaten Lamongan tahun 2021 ini didasarkan kepada pengukuran tingkat capaian kinerja BPBD Kabupaten Lamongan tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja BPBD Kabupaten Lamongan tahun 2021 dengan realisasinya

1. Pencapaian kinerja

Capaian Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi BPBD memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Lamongan. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan Kabupaten pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategik.

Pengukuran dimaksud merupakan hasil dan suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan (input) dan keluaran (output), sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau dalam proses penyusunan kebijakan program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

NO	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Rasio peningkatan kemampuan komunitas masyarakat tentang kebencanaan di daerah rawan bencana	91,55%	97,44%	106%
2	Persentase Penanganan bencana yang ditangani dengan cepat dan tepat	100%	100%	100%
3	Persentase kerusakan akibat bencana yang telah direhabilitasi sesuai dengan SOP	100%	100%	100%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Lamongan urusan Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Lingkup Bidang Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai berikut:

1. Program Pencegahan dini dan Penanggulangan Korban Bencana

- a) Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota dengan alokasi dana sebesar Rp. 95.000.000 Yang dipergunakan untuk membuat dokumen KRB, Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 94.105.000 atau 100%
- b) Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) dengan alokasi dana sebesar Rp. 10.000.000 Yang dipergunakan untuk sosialisasi Desa, Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 0
- c) Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota dengan alokasi dana sebesar Rp. 20.000.000 dipergunakan untuk jaga posko 60 Hari, Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 19.022.000
- d) Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota dengan alokasi dana sebesar Rp. 20.000.000 Yang dipergunakan 4 Peserta Pelatihan, Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 20.000.000

2. Program Penanganan Tanggap Darurat Bencana

- a) Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota dengan alokasi dana sebesar Rp. 15.000.000 yang dipergunakan untuk belanja BBM penanganan bencana/penanganan darurat bencana. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 14.883.000.
- b) Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota dengan alokasi dana sebesar Rp. 10.000.000 yang dipergunakan untuk yang dipergunakan untuk belanja Helm Safety Excellent. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 74.700.000 atau 99.60 %.

- c) Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota dengan alokasi dana sebesar Rp. 367.000.000 yang dipergunakan untuk belanja bahan banjir (bongkolan 100 Batang, gedeg guling 300 m, dan terpal 30) dan belanja bantuan sembako sebanyak 300 paket. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 366.024.000 atau 99,32%. Sedangkan realisasi fisik mencapai 100%.
- d) Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana dengan alokasi dana sebesar Rp. 14.999.850 yang dipergunakan untuk jaga posko bencana selama 45 hari dan penanganan bencana/penanganan darurat bencana selama 12 bulan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 41.027.000 atau 82,05%.

3. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana

- a) Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota)dengan alokasi dana sebesar Rp. 75.000.000 yang dipergunakan untuk Bantuan Bahan Bangunan 1 Paket, 1 Laporan Monev, Pelaksanaan Monev 11 Kali. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 74.625.000 atau 99,50%. Sedangkan realisasi fisik mencapai 100%.
- b) Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota dengan alokasi dana sebesar Rp.75.000.000 yang dipergunakan untuk 1 Aturan/Dokumen Regulasi. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 74.632.850 atau 99,51%. Sedangkan realisasi fisik mencapai 100%

Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja dengan cara membandingkan antara rencana kinerja dengan realisasi ditinjau dari aspek masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) maupun dampak (impact). Hasil pengukuran terhadap pencapaian komponen kinerja ini dituangkan kedalam formulir Rencana Strategi (RS), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Pengukuran Kinerja (PK) dan Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK). Skala pengukuran kinerja tersebut dibuat dengan menggunakan skala pengukuran ordinal, yaitu :

85 - 100	: Sangat Baik / Sangat Berhasil
70 - 85	: Baik / Berhasil
55 - 70	: Kurang Baik / Kurang Berhasil
< 55	: Sangat Kurang Baik / Tidak Berhasil

2. Perbandingan realisasi kinerja

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	2020	2021	
			Capaian	Target	Capaian
1.	Terwujudnya Masyarakat yang Tangguh Bencana	Presentase Peningkatan Kemampuan Komunitas Masy. Tentang kebencanaan di daerah Rawan Bencana	100 %	91,44	106%
2.	Terwujudnya penanganan darurat bencana yang cepat dan tepat	Prosentase Penanganan bencana saat tanggap darurat	100 %	100 %	100 %
3.	Terwujudnya pemulihan masyarakat dan sarpras yang lebih baik	Prosentase penanganan rehabilitasi dan rekontruksi	100 %	100 %	100 %

1. Kegiatan pembentukan desa tangguh

Pembentukan dan pembinaan desa tangguh bencana,

Tahun 2020

Rencana pembentukan desa tangguh 10 desa dan terlaksana secara keseluruhan yaitu 10 desa, sehingga telah memenuhi target 100%.

Tahun 2021

Rencana pembentukan desa tangguh 20 desa dan terlaksana keseluruhannya yaitu 20 desa, sehingga telah memenuhi target 100%

Operasional Pusdalaops Penanggulangan Bencana

Tahun 2020

Dari rencana peralatan penunjang operasional pusdalops 4 Bulan dan 1 Pelatihan.

Tahun 2021

Dari rencana peralatan penunjang operasional pusdalops 3 Bulan.

2. Pengendalian bencana alam saat tanggap darurat tahun 2021 lebih cepat tercapainya dibandingkan Tahun 2020 oleh karena :

- a) Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung baik sarana mobilitas dan alat penanganan saat tanggap darurat :
 - Bertambahnya HT, dan alat Chainsaw
 - Bahan – Bahan logistik lainnya
- b) Kesiapan Tenaga Reaksi Cepat (TRC) dalam penanganan saat terjadi bencana karena didukung adanya pelatihan – pelatihan baik yang diadakan sendiri dan eksebsi ke kabupaten, Propinsi dan Pusat.
- c) Dukungan anggaran yang meningkat di bidang kedaruratan.
- d) Leadership / kepemimpinan pada level top manager sampai dengann bawahan lebih terorganisasi dengan baik.
- e) Perencanaan program darin bottom up / masukan dari bawah yang diakomodasi melalui program – program kegiatan

3. Pengendalian bencana alam pasca bencana sangat ditentukan oleh tahapan pengendalian bencana mulai prabencana saat bencana dan pasca bencana ;

- a) Pada tahun 2020, keterpaduan antara pengendalian bencana saat pra bencana sampai pasca bencana kurang adanya koordinasi dan sinkronisasi sehingga kegiatan yang dilakukan bersifat parsial. Sedangkan Tahun 2021 pengendalian pasca bencana lebih sinergi antar bidang sehingga program dan kegiatan lebih berhasil.
- b) Pada Tahun 2020 Informasi kebencanaa belum dilaksanakan secara massiv, sedangkan Tahun 2021 informasi kebencanaan lebih massiv dan terdapat aplikasi pasca bencana yakni INARISK, dengan aplikasi ini nilai kerentanan bencana (Indeks bencana) bobot-bobot yang kurang bisa ditingkatkan /antisipasi, misalkan dengan program – program perbaikan tanggul sungai, normalisasi sungai, perbaikan saluran air dan jalan serta jembatan dapat diperbaiki kualitasnya.
- c) Pada Tahun 2020 faktor kerugian dan kerusakan akibat bencana pada tahap pasca bencana belum dapat ditentukan baik sektor pertanian, perikanan maupun fisik perumahan, jalan / jembatan, akn tetapi pada tahun 2021 sudah dapat diproyeksikan, sehingga koordinasi dengan OPD tehnis dapat berjalan dengan baik.
- d) Pada Tahun 2020 moninoring terhadap kerusakan pasca bencana belum dilakukan secara koordinatif dan parsial, sedangkan pada tahun 2021 dilakukan secara koordinatif

3. Perbandingan realisasi kinerja s.d akhir periode RJMD/RENSTRA

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2021	Rencana Sesuai dengan Renstra dan RPJMD	Prosentasi Capaian Kinerja
1.	Terwujudnya pengendalian bencana alam saat pra bencana	Presentase Peningkatan Kemampuan Komunitas Masy. Tentang kebencanaan di daerah Rawan Bencana	%	91,55	97,44	106
2.	Terwujudnya pengendalian bencana alam saat tanggap darurat	Prosentase Penanganan bencana saat tanggap darurat	%	100	100	100
3.	Terwujudnya pengendalian bencana alam saat pasca bencana	Prosentase penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi	%	100	100	100

4. Perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi nasional

Standart Pelayanan Minimal yang di tetapkan pemerintah melalui Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 SPM Sub urusan Bencana Daerah.

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standart Pelayanan Minimal		Realisasi Kinerja
		Indikator	Nilai	
1.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah Warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100 %	100 %
2.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	100 %
3.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%

5. Analisis penyebab keberhasilan yang telah dilakukan

Keberhasilan pencapaian target kinerja sasaran program tidak terlepas dengan adanya sumber daya aparatur, sarana dan prasarana pendukung serta sumber dana pendukung kegiatan dari APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2021 yang selaras dengan pencapaian target di masing-masing kegiatan.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Sumber daya aparatur yang ideal di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan berdasarkan hasil analisa jabatan (Anjab) berjumlah 14 orang, sehingga saat ini sumber daya aparatur telah mencapai 14 orang sehingga sudah termasuk ideal dari Pejabat Eselon III dan Pejabat Eselon IV.

Sarana dan prasarana pendukung yang ada dioptimalkan agar dapat mencapai target kinerja sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan baik RPJMD, Renstra-OPD maupun Standart Pelayanan Minimal yang ditetapkan pemerintah melalui Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 SPM Sub urusan Bencana Daerah.

Untuk mengukur efisiensi anggaran yang telah dialokasikan, maka dilakukan keselarasan antara sasaran yang ditetapkan dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan, selanjutnya sumber daya biaya yang tersedia sebesar Rp. 3.937.417.248,- (Tiga Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Empat Ratus Tujuh Belas Dua Ratus Empat Puluh Delapan) dan yang telah direalisasikan sebesar Rp. 3.685.935.211,- (Tiga Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Lima Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Dua Ratus Sebelah), atau 93.61 persen. dengan rincian sebagai berikut :

Perangkat Daerah Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.937.417.248	3.685.935.211
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	32.000.000	32.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	22.000.000	22.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.000.000	21.983.000
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.552.295.548	2.518.399.958

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.800.000	10.798.500
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	15.000.000	14.997.150
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.000.000	4.988.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.000.000	24.899.700
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.096.000	20.109.900
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.000.000	10.890.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55.000.000	21.351.262
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	102.500.000	64.773.657
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000	20.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	496.064.000	456.126.984
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	31.266.000	20.495.600
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	58.086.000	33.300.800
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.758.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	126.500.00	125.550.000

PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENAGGULANGAN KORBAN BENCANA		
Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	95.000.000	94.105.000
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	10.000.000	0
Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	20.000.000	19.022.000
Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	20.000.000	20.000.000
PROGRAM PENANGANAN TANGGAP DARURAT		
Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	15.000.000	14.883.000
Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	10.000.000	10.000.000
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	70.000.000	70.000.000
Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	14.999.850	14.999.850
PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA		
Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	40.013.350	36.590.100
Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	10.038.500	9.466.400

7. Analisi program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun pencapaian kinerja

Program dan kegiatan penunjang keberhasilan capaian target kinerja tidak terlepas dari sistem perencanaan yang membreakdown dari target kinerja sasaran yang ingin dicapai khususnya yang langsung bersentuhan dengan kepentingan pelayanan masyarakat / stake holders dalam bentuk kegiatan jemput bola.

B. REALISASI ANGGARAN

LKJIP BPBD Kabupaten Lamongan menyajikan data dan informasi yang relevan untuk mengetahui keberhasilan kegiatan dan menentukan perumusan tindak lanjut. Analisis tersebut meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, dan misi serta visi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategik. Dalam analisis ini dijelaskan pula perkembangan kondisi pencapaian sasaran dan tujuan secara efisien dan efektif, sesuai dengan kebijakan, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan. Analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan informasi/ data yang diperoleh secara lengkap dan akurat dan dilakukan pula evaluasi kebijakan untuk mengetahui ketepatan dan efektivitas baik kebijakan itu sendiri maupun sistem dan proses pelaksanaannya.

Sebagai lembaga di daerah yang diserahi tugas untuk melaksanakan tanggung jawab penanggulangan bencana maka tugas pokok dan fungsi BPBD Kabupaten Lamongan juga disinkronisasi dengan perkembangan keadaan masyarakat sekitar. BPBD merupakan unsur pendukung tugas Kepala daerah di Bidang kesatuan bangsa dan politik yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang secara ex-officio di jabat oleh Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. adapun Program dan kegiatan yang direalisasikan oleh BPBD Kabupaten Lamongan dalam rangka penanggulangan bencana di Kabupaten Lamongan tahun 2021 sebesar Rp. 3.937.417.248,- (Tiga Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Empat Ratus Tujuh Belas Dua Ratus Empat Puluh Delapan) dan yang telah direalisasikan sebesar Rp. 3.685.935.211,- (Tiga Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Lima Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Dua Ratus Sebelas), atau 93.61 persen, adapun rincian penggunaan anggaran pembangunan sebagai berikut :

Perangkat Daerah / Program / kegiatan	Anggaran
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.937.417.248
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.632.365.548

PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENAGGULANGAN KORBAN BENCANA	145.000.000
PROGRAM PENANGANAN TANGGAP DARURAT	109.999.850
PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA	50.051.850

Perangkat Daerah Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.937.417.248	3.685.935.211
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	32.000.000	32.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	22.000.000	22.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.000.000	21.983.000
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.552.295.548	2.518.399.958
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.800.000	10.798.500
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	15.000.000	14.997.150
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	0
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.000.000	4.988.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.000.000	24.899.700
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.096.000	20.109.900
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.000.000	10.890.000

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55.000.000	21.351.262
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	102.500.000	64.773.657
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000	20.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	496.064.000	456.126.984
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	31.266.000	20.495.600
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	58.086.000	33.300.800
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.758.000	0
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	126.500.00	125.550.000
PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENAGGULANGAN KORBAN BENCANA		
Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	95.000.000	94.105.000
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	10.000.000	0
Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	20.000.000	19.022.000
Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	20.000.000	20.000.000

PROGRAM PENANGANAN TANGGAP DARURAT		
Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	15.000.000	14.883.000
Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	10.000.000	10.000.000
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	70.000.000	70.000.000
Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	14.999.850	14.999.850
PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA		
Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	40.013.350	36.590.100
Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	10.038.500	9.466.400

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKJIP) BPBD Kabupaten Lamongan Tahun 2021 merupakan pertanggungjawaban atas kinerja lembaga dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis BPBD Kabupaten Lamongan tahun 2016–2021 yang berisi uraian tentang capaian indikator kinerja kegiatan, program dan sasaran yang telah dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Lamongan pada tahun 2021.

Secara umum pada Tahun Anggaran 2021, BPBD Kabupaten Lamongan telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang dibebankan, serta dapat pula memenuhi sasaran. Fungsi utama yang diharapkan dari BPBD Kabupaten Lamongan yakni penyiapan perumusan kebijaksanaan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Dalam mendukung pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja, BPBD Kabupaten Lamongan mendapatkan alokasi dana belanja langsung untuk tahun anggaran Kabupaten Lamongan tahun 2021 sebesar Rp. 3.937.417.248,- (Tiga Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Empat Ratus Tujuh Belas Dua Ratus Empat Puluh Delapan) dan yang telah direalisasikan sebesar Rp. 3.685.935.211,- (Tiga Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Lima Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Dua Ratus Sebelas), atau 93.61 persen

Dalam setiap pelaksanaan kegiatan, tidak terlepas dari hambatan ataupun kendala. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan kinerja dan penganggaran masih belum dilakukan secara baik sehingga harus dilakukan penyesuaian (revisi) dokumen anggaran yang berdampak pada keterlambatan dalam penyerapan anggaran.
2. Masih terbatasnya jumlah dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung pelaksanaan kegiatan. Khususnya dalam petugas lapangan dari TRC (Tim Reaksi Cepat) dan Pusdalops.
3. Sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya terpenuhi, seperti belum tersedianya sistem informasi bersama internal BPBD Kabupaten Lamongan, terbatasnya jumlah kendaraan operasional, dan belum memadainya gudang penyimpanan ATK, Arsip dan Aset Barang Milik BPBD Kabupaten Lamongan.

B. SARAN

Dalam setiap pelaksanaan kegiatan, kami melakukan evaluasi dan melakukan perencanaan untuk menjadikan yang lebih baik lagi untuk menjadi landasan dan acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Melakukan Perencanaan kinerja dan penganggaran yang seefektif mungkin untuk mempercepat penganggaran di tahun-tahun berikutnya sehingga tidak harus melakukan penyesuaian (revisi) dokumen anggaran yang akan berdampak pada keterlambatan dalam penyerapan anggaran.
2. Memaksimalkan petugas-petugas lapangan yang ada saat ini dan juga berusaha untuk melakukan penambahan-penambahan personilpetugas lapangan dari TRC (Tim Reaksi Cepat) dan Pusdalops.
3. Melakukan upaya-upaya menambah Sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, seperti sistem informasi bersama internal BPBD Kabupaten Lamongan, jumlah kendaraan operasional, dan gudang penyimpanan ATK, Arsip dan Aset Barang Milik BPBD Kabupaten Lamongan.

Agar selalu dapat mempertahankan dan memperbaiki kinerja yang telah dicapai, sangat diharapkan adanya kerjasama yang baik antara berbagai pihak yang terkait tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Lamongan dalam bentuk koordinasi teknis dengan Instansi terkait dalam hal perencanaan, pengendalian dan pengawasan dalam rangka penanggulangan bencana di Kabupaten Lamongan. Perlu digaris bawahi bahwa penyusunan Laporan Akuntabilitas Intansi Pemerintah oleh BPBD Kabupaten Lamongan ini masih jauh dari sempurna, sehingga masih perlu adanya perbaikan -perbaikan, baik format penyajian maupun dalam mengkaji permasalahan-permasalahan yang ada.

Akhirnya semoga ALLAH SWT senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kita semua.

Lamongan, Desember 2021

**KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN LAMONGAN**

Dr. MUGITO, M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 19671024 198809 1 001

LAMPIRAN – LAMPIRAN

PENYELARASAN ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

MISI 3			
Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga kelestarian lingkungan			
TUJUAN			
Tersedianya infrastruktur yang mampu mendukung peningkatan aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat Kabupaten Lamongan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan			
SASARAN 6			
Terwujudnya pengendalian bencana alam			
Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
Terwujudnya pengendalian bencana alam	1. Terwujudnya masyarakat yang tangguh bencana	1. Tanggap darurat dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana	1. Kesiapsiagaan (kontinjensi) dalam menghadapi bencana alam
	2. Terwujudnya penanganan darurat bencana yang cepat dan tepat	2. Penanganan dan pengelolaan pasca bencana	2. Pembinaan masyarakat dalam menghadapi bencana
	3. Terwujudnya pemulihan masyarakat dan sarpras yang lebih baik		3. Penyediaan sarana dan prasarana menghadapi bencana 4. Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana

RPJMD
Kabupaten
Lamongan Th
2016-2021

PENJELASAN TUJUAN DAN SASARAN DEFINISI OPERASIONAL, FORMULA, SUMBER DATA, DAN PENETAPAN TARGET

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Formula	Kondisi Awal	Kondisi Akhir							
Mewujudkan peningkatan pengendalian bencana alam	Persentase desa tangguh	$\frac{\text{Jumlah Desa Tangguh Bencana}}{\text{Jumlah Desa Rawan Bencana}} \times 100$	5,63	91,55							
Sasaran ke - 1											
Terwujudnya masyarakat yang tangguh bencana											
Indikator	Formula	Definisi Operasional	Sumber Data	Kondisi Awal	Target Kinerja						Kondisi Akhir
Rasio Peningkatan Kemampuan Komunitas Masyarakat Tentang kebencanaan Di daerah Rawan Bencana	$\frac{\text{Jumlah Komunitas masy. Yang dibina}}{\text{Jumlah Komunitas yang ada di daerah rawan bencana}} \times 100$	Tingkat pemahaman dan kemampuan masyarakat dalam memahami bencana dari sebelum dan sesudah dilakukannya sosialisasi / pelatihan	- Peta Rawan Bencana - RKA / DPA		2016	2017	2018	2019	2020	2021	100%
					100%						
					100%						
					100%						
					100%						
Sasaran ke - 2											
Terwujudnya penanganan darurat bencana yang cepat dan tepat											
Indikator	Formula	Definisi Operasional	Sumber Data	Kondisi Awal	Target Kinerja						Kondisi Akhir
Prosentase penanganan bencana yang ditangani dengan cepat dan tepat	$\frac{\text{Jumlah bencana yang tertangani}}{\text{Jumlah bencana yang terjadi}} \times 100$	Tingkat pengendalian bencana saat tanggap darurat	- Peta Rawan Bencana - Laporan Kejadian Bencana - RKA / DPA		2016	2017	2018	2019	2020	2021	100%
					100%						
					100%						
					100%						
					100%						
Sasaran ke - 3											
Terwujudnya pemulihan masyarakat dan sarpras yang lebih baik											
Indikator	Formula	Definisi Operasional	Sumber Data	Kondisi Awal	Target Kinerja						Kondisi Akhir
Prosentase kerusakan akibat bencana yang telah direhabilitasi sesuai dengan SOP	$\frac{\text{Jumlah obyek terdampak yang diregani}}{\text{Jumlah keseluruhan obyek terdampak}} \times 100$	Tingkat pemenuhan dan sarpras pasca bencana	- Peta Rawan Bencana - Identifikasi kerusakan dan kerugian akibat Bencana - RKA / DPA		2016	2017	2018	2019	2020	2021	100%
					100%						
					100%						
					100%						
					100%						

PROGRAM BPBD TAHUN 2016 - 2021

OPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan

Program	Indikator Program	Formula Indikator	Kondisi Awal 2015	Kondisi Awal 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Target Akhir 2021
URUSAN WAJIB :									
Program Pencegahan dini dan dini dan Kesiapsiagaan Dalam Penanggulangan Bencana	% Pencegahan dini dan dini dan Kesiapsiagaan bencana	Jumlah komunitas masyarakat yang sudah dibina di daerah rawan bencana Jumlah komunitas yang ada di daerah rawan bencana $\frac{\text{Jumlah komunitas yang sudah dibina}}{\text{Jumlah komunitas yang ada di daerah rawan bencana}} \times 100$			100	100	100	100	100
Program Penanganan Tanggap Darurat Bencana	% Penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Jumlah kejadian bencana yang ditangani Jumlah Kejadian Bencana $\frac{\text{Jumlah kejadian bencana yang ditangani}}{\text{Jumlah Kejadian Bencana}} \times 100$			100	100	100	100	100
Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	% Terwujudnya pengendalian bencana alam saat pasca bencana	Jumlah kerusakan akibat bencana yang terdeteksi / Jumlah kerusakan Jumlah kerusakan akibat bencana yang terjadi $\frac{\text{Jumlah kerusakan akibat bencana yang terdeteksi}}{\text{Jumlah kerusakan akibat bencana yang terjadi}} \times 100$			100	100	100	100	100

**MATRIK RENSTRA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LAKONGAN
TAHUN 2016 - 2021**

OPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	RUMUS	KONDISI AWAL 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Mewujudkan Pengendalian Bencana Alam	Prosentase desa tangguh bencana	$\frac{\text{Jumlah desa tangguh bencana}}{\text{Jumlah desa rawan bencana}} \times 100$	5,63	7,04	23,94	4,85	74,65	91,55	91,55

TABEL MATRIK SASARAN

TUJUAN	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	RUMUS	KONDISI AWAL 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Terwujudnya Masyarakat Tangguh Bencana	Rasio Kemampuan Komunitas	Peningkatan Kemampuan Komunitas	$\frac{\text{Jumlah komunitas masy. yang sudah dilatih di daerah rawan bencana}}{\text{Jumlah komunitas yang ada di daerah rawan bencana}} \times 100$	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penanganan darurat bencana yang cepat dan tepat	Prosentase penanganan bencana yang ditangani dengan cepat dan tepat	$\frac{\text{Jumlah bencana yang ditangani}}{\text{Jumlah kejadian bencana}} \times 100$	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya pemulihan masyarakat dan sarpras yang lebih baik	Prosentase kerusakan akibat bencana yang telah direhabilitasi dengan SOP sesuai	$\frac{\text{Jumlah Kerusakan akibat bencana yang terdeteksi / Jumlah Kerusakan akibat bencana yang telah direhabilitasi}}{\text{Jumlah Kerusakan akibat bencana yang terjadi}} \times 100$	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Program	INDIKATOR TUJUAN	RUMUS	KONDISI AWAL 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Program Pencegahan dini dan kesiapsiagaan Dalam Penanggulangan Bencana	% Pencegahan dini dan mitigasi bencana	Jumlah Komunitas masy. Yang Sudah dibina di daerah rawan bencana $\times 100$	62,96%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Program Penanganan Tanggap Darurat Bencana	% Pengendalian bencana pada saat tanggap darurat	Jumlah bencana yang ditangani $\times 100$	0		100%	100%	100%	100%	100%
Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	% Terwujudnya pengendalian bencana alam saat pasca bencana	Jumlah bencana yang terdeteksi / Jumlah Kerusakan akibat bencana yang $\times 100$	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%

